

# RENCANA KERJA

## DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan periode tahun 2018-2023, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN “**.

Dokumen Renja Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2022 disusun secara terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2022 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan. Selain itu, program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan bagian dari program unggulan yang menjadi bagian dari janji politis Kepala Daerah yang tertuang dalam slogan **“PANCAKARSA”**. Adapun janji politis Kepala Daerah yang didukung oleh Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Karsa **‘Bogor Maju’**. Karsa ini merupakan tekad dan keinginan Bupati Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju dalam hal perekonomian daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik, melalui optimalisasi layanan publik, penciptaan iklim investasi yang

nyaman, perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan, pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM, pengembangan industri pariwisata berbasis masyarakat, serta pemberdayaan pelaku usaha.

Arah kebijakan pelaksanaan karsa Bogor Maju yang akan ditempuh oleh Dinas Perikanan dan Peternakan adalah dengan cara membantu pelaku usaha UMKM mengembangkan produk-produk hasil perikanan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan. Upaya pengembangan produk-produk tersebut adalah dengan cara meningkatkan mutu dan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas produk perikanan dan peternakan tidak terlepas dari peran generasi muda (Milenial) yang terjun di bidang ini, maka dari itu pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Dinas Perikanan dan Peternakan akan membantu dan memberi ruang bagi para **petani milenial** tersebut untuk mengembangkan karyanya di bidang perikanan dan peternakan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2022 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/Permen-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12); dan
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor ..... Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023.

19. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Nomor ...../Kpts/Disnakkan Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;
20. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Nomor ...../Kpts/Disnakkan Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang menjabarkan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor. Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan dasar atau patokan dalam penyusunan Renja Tahun 2022.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2022 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022, Penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun 2022, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2022 dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan dan Peternakan. Dalam proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas

Perikanan dan Peternakan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renja.

Sistematika penulisan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2022 sebagai berikut:

**BAB I       PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II       HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III       TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan Kebijakan Nasional, dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran PD.

**BAB IV       PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2021

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018 – 2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic.

Capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja program dan kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Bogor, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor untuk tahun 2021 memperoleh anggaran DPA yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor dan APBN (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

➤ Pendapatan	: Rp.	640.180.000,-
➤ Belanja Daerah	: Rp.	42.426.747.000,-
- APBD MURNI	: Rp.	41.448.747.000,-
- DAK KKP	: Rp.	978.000.000,-

Pada bulan Februari 2021, mengalami Refocusing menjadi:

➤ Belanja Daerah	: Rp.	39.005.018.363,-
- APBD MURNI	: Rp.	38.027.018.363,-
- DAK KKP	: Rp.	978.000.000,-

\*berkurang Rp. 3.421.728.637 dari pagu awal APBD

Pada bulan Oktober 2021, mengalami perubahan kembali menjadi:

➤ Belanja Daerah	: Rp.	39.268.390.531,-
- APBD MURNI	: Rp.	38.290.390.531,-
- DAK KKP	: Rp.	978.000.000,-

\*bertambah Rp. 263.372.168 dari pagu Parsial

Adapun realisasi keuangan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

➤ Pendapatan	: Rp.	xxx.xxx.xxx,- (xxx %)
➤ Belanja Daerah	: Rp.	Xx.....,- (xx %)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2021



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	95		
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	126.985		
3	Jumlah Produksi Benih Ikan	RE	5.770.238		
4	Jumlah Produksi Ikan Hias	RE	296.417		
5	Jumlah Petani Milenial (Pembudidaya Ikan)	Orang	50		
6	Persentase Perairan Umum yang di monitoring	%	15		
7	Persentase konservasi penangkapan dan budidaya ikan yang berkelanjutan	%	15		
8	Jumlah Produksi Olahan perikanan	Ton	16.359		
9	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg./Kap/Thn	30,36		
10	Jumlah Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)	Ton	534.761		
11	Jumlah Infrastruktur yang baik	Unit	10		
12	Jumlah Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (peternakan)	Unit usaha	60		
13	Jumlah Kelompok peternak	Kelompok	19		
14	Jumlah Petani Milenial (Peternak)	Orang	20		
15	Persentase Pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis	%	60		
16	Jumlah Penyakit yang dikendalikan	Jenis	NA		

Berdasarkan dokumen Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021 terdapat 10 Program yang dilaksanakan. Realisasi pelaksanaan program Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.

**Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan  
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Bogor Tahun 2021**

No	Program	Pagu	Realisasi	Keu	Fisik	SILPA
----	---------	------	-----------	-----	-------	-------

		Anggaran (Rp)	Keuangan (Rp)	(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>					
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap					
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya					
3	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan					
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
5	<b>URUSAN PERTANIAN</b>					
	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian					
6	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian					
7	Perizinan usaha pertanian					
8	Penyuluhan pertanian					
9	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					
10	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>					

Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tahun 2021 telah mendorong masyarakat dan swasta di Kabupaten Bogor, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi

terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2021, maka evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2021 dan capaian Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

### **Indikator Kinerja**

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Perikanan dan Peternakan memberikan kontribusi terhadap pencapaian salah satu dari lima Panca Karsa Kabupaten Bogor yaitu "**Bogor Maju**", mewujudkan perekonomian daerah berdayasaing dan berkelanjutan. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebesar 100,73%, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci adalah sebagai berikut :

- 1) Produksi Ikan dari rencana sebesar 123.963 ton, terealisasi sebesar 123.134 ton, atau 100,94%;
- 2) Produksi Ikan Hias dari rencana sebesar 287.721 RE, terealisasi sebesar 290.440,09 RE, atau 100,95%;
- 3) Produksi Benih Ikan dari rencana sebesar 5.628.676 RE, terealisasi sebesar 5.677.645,98 RE, atau 100,87%;
- 4) Konsumsi Ikan dari rencana sebesar 29,77 kg/kap/thn, terealisasi sebesar 29,77 kg/kap/thn, atau 100,00%;
- 5) Produksi Olahan Produk Perikanan dari rencana sebesar 22.718 Ton, terealisasi sebesar 22.728 Ton, atau 100,05%;
- 6) Produksi Daging dari rencana sebesar 187.645 Ton terealisasi sebesar 191.756 Ton, atau 102,19%.
- 7) Produksi telur dari rencana sebesar 47.520 Ton terealisasi sebesar 47.587 Ton, atau 100,14%.

8) Produksi Susu dari rencana sebesar 19.335 Ton terealisasi sebesar 19.466 Ton, atau 100,69%;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2021 menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 100%, termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 28.084.587.088; atau 96,15% dari total rencana anggaran Rp. 29.208.069.000,-. Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**, dengan kegiatan yang mendukung urusan perikanan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1.1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
    - 1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
    - 1.1.3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
  
2. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**, dengan kegiatan yang mendukung urusan perikanan sebanyak ..... kegiatan dan .... Sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan

Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.

- 2.2 Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
  - 2.2.1 Sub Kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
  - 2.2.2 Sub Kegiatan pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- 2.3 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.3.1 Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2.4 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
  - 2.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.4.3 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.4.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### **3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- 3.1 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
  - 3.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

3.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

#### **4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

4.1 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

4.1.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

4.2.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

4.3 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

4.3.1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.3.2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

5.1 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

5.2 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

5.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

- 5.3 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
  - 5.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- 5.4 Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
  - 5.4.1 Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
- 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
  - 6.1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
    - 6.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
  - 6.2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
    - 6.2.1 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- 7. Program Penyuluhan Pertanian**
  - 7.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
    - 7.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- 8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
  - 8.1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 8.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
  - 8.2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
    - 8.2.1. Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
    - 8.2.2. Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

8.2.3. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

8.3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

8.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

8.4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

8.4.1. Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

8.4.2. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

8.4.3. Sub Kegiatan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

8.4.4. Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

## **9. Program Perizinan Usaha Pertanian**

9.1. Kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

9.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

## **10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

10.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

10.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

10.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

10.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

10.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

10.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

10.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

10.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- 10.2.1 sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 10.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 10.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 10.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 10.2.5 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - 10.2.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  - 10.2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 10.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 10.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 10.3.2 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - 10.3.3 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 10.3.4 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 10.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 10.4.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - 10.4.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 10.4.3 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 10.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 10.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 10.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 10.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 10.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 10.5.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 10.5.7 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- 10.5.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10.5.9 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 10.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 10.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 10.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - 10.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 10.6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 10.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 10.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 10.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 10.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 10.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

10.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

10.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

10.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

10.8.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor mendukung 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu: Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatannya, Dinas Perikanan dan Peternakan tidak terlepas dari Visi dan Misi kedua lembaga tersebut.

##### **A. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Visi Kementerian Kelautan RI tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terutama melaksanakan empat misi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Menjabarkan mision pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, Yakni:
  - a. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP Meningkatkan;
  - b. Inovasi dan Riset KP menguat;

2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni:
  - a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal;
  - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat;
  - c. Pengawasan pengelolaan SDKP;
  - d. Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat;
  - e. Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumberdaya KP, yakni:  
Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP, yakni:  
Kinerja reformasi birokrasi KKP meningkat

## **B. URUSAN PERTANIAN**

Visi Kementerian Pertanian adalah “**Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**”.

Misi Kementerian Pertanian, adalah:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan Nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran prioritas nasional bidang ketahanan pangan lingkup perikanan dan peternakan diantaranya:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri melalui produksi daging.

2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengembangan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistem Logistik Nasional dan penerapan sistem rantai dingin di 100 sentra perikanan.
3. Terwujudnya perbaikan sistem manajemen Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menjaga keberlanjutan kelimpahan stok sumberdaya ikan.

Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan terkait dengan perikanan dan peternakan adalah sebagai berikut:

- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi, melalui: (i) peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap sesuai potensi dan keunggulan lokal dan tata ruang wilayah; (ii) pengembangan budidaya (marikultur) dilokasi-lokasi potensial; (iii) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (iv) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha perikanan; (v) melanjutkan revitalisasi tambak-tambak dan kolam yang tidak produktif; (vi) pengembangan keterpaduan usaha hulu dan hilir, termasuk penguatan sentra-sentra pengolahan produk perikanan berbasis keunggulan lokal yang diintegrasikan dengan model pengembangan *techno park* dan *science park*; (vii) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan.
- 2) Penguatan Faktor Input dan Sarana Prasarana Pendukung Produksi, dengan: (i) menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input, yang mencakup BBM, benih ikan berkualitas (unggul), pakan murah, obat-obatan, dan pakan berbasis bahan baku lokal (ii) penguatan sistem dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan induk

- unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting; (iii) pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur pelabuhan perikanan dan sarana penangkapan ikan dan pengembangan *eco fishing port* di lokasi-lokasi terpilih dan strategis termasuk restrukturisasi dan modernisasi armada perikanan untuk peningkatan operasional kapal-kapal skala menengah dan besar (30 GT keatas); (iv) melengkapi pasokan air bersih dan energi (listrik) di pelabuhan perikanan; (v) pengembangan infrastruktur irigasi ke tambak dan kolam dengan kerjasama lintas pelaku dan pemerintah daerah; (vi) Pengembangan Kebun bibit rumput laut di wilayah yang potensial
- 3) Penguatan keamanan produk pangan perikanan, melalui: (i) peningkatan efektivitas karantina perikanan untuk pengendalian penyakit, jaminan mutu produksi dan keamanan pangan melalui sistem karantina yang terintegrasi (*Integrated Quarantine and Safety Control Mechanism*) dan pencegahan/penanggulangan penyakit ikan (*Biosecurity*); (ii) penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (*Good Aquaculture Practices*) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (*Good Handling Practices*) pada pembudidaya ikan tersertifikasi; dan (iii) pengembangan produk perikanan berkualitas dan memenuhi standar *Hazard Analysis and Critical Control/HACCP* untuk menjamin keamanan produk dan mutu pangan olahan.
- 4) Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan, melalui: (i) pembentukan sistem dan kelembagaan penjamin pelaku dan usaha perikanan; (ii) dukungan penyediaan sumber pembiayaan yang murah, mudah, dan aksesibel untuk pengembangan perikanan; (iii) pengembangan fasilitasi kredit dan pengembangan asuransi nelayan; (iv) pemberian pelatihan kemampuan teknis untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (v) pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan, antara lain melalui gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil laut; (vi) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan (vii) penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi

nelayan/petambak garam/ pembudidaya/ pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.

- 5) Peningkatan produksi daging sapi dan non sapi dalam negeri melalui: (i) penambahan populasi bibit induk sapi, (ii) pengembangan kawasan peternakan dengan mendorong investasi swasta dan BUMN dan peternakan rakyat non sapi; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penambahan bibit induk sapi, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan nasional untuk pengendalian penyakit, khususnya zoonosis;
- 6) Pengembangan kawasan sentra produksi komoditas unggulan yang diintegrasikan dengan model pengembangan *techno park* dan *science park*, dan pasar tradisional serta terhubung dengan tol laut;
- 7) Penguatan sistem keamanan pangan melalui perkarantinaan dan pengendalian zoonosis.

### 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Sebagai bentuk tindak lanjut rencana pembangunan nasional maka Provinsi Jawa Barat pun menyusun arah pembangunannya sejalan dengan yang digariskan pemerintah pusat. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”** dan dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu:

Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023



Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terdapat 5 (lima) isu strategis dalam pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, Pengangguran, dan masalah social;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; serta
5. Reformasi Birokrasi.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Jawa Barat 2018-2023 menjadi 9 prioritas, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua;
2. Desentralisasi peelayanan kesehatan;
3. Pertumbuhan ekonomi uat berbasis inovasi;
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
6. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah pengelolaan lingkungan hidup;
7. Gerakan membangun desa (Gerbang Desa);
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (Golekmah); dan
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Kebijakan operasional pembangunan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018-2023 adalah:

1. Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah;

2. Menuntaskan program-program yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan;
3. Memberi dukungan, pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha;
4. Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan pembangunannya karena mengalami hambatan;
5. Melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama bupati dan walikota dengan dukungan dari pemerintah pusat.

Pembangunan perikanan dan peternakan termasuk dalam isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa upaya yang akan dilakukan diantaranya: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan, dan (2) Ketahanan Pangan. Pembangunan perikanan dan peternakan termasuk dalam target *Common Goals* Tematik Sektoral; Meningkatkan Ekonomi Pertanian dengan sasaran:

1. Jawa Barat sebagai sentra produksi benih/bibit nasional;
2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry;
3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani;
4. Jawa Barat bebas rawan pangan;
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan.

Sedangkan dalam Pembangunan Tematik Sektoral, Kabupaten Bogor yang tergabung dalam zona pengembangan wilayah I diarahkan untuk (1) Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas

lokal, dan (2) Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global.

### 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 2022

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor secara fungsional memiliki fungsi dan peranan sebagai lembaga yang tidak hanya menjabarkan kebijakan daerah, akan tetapi harus menjabarkan pula kebijakan pembangunan yang telah digariskan secara nasional.

#### 3.3.1 Tujuan Kinerja Tahun 2022

Tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan adalah **“Meningkatkan ketersediaan produk perikanan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan”**

#### 3.3.2 Sasaran Kinerja Tahun 2022

Adapun sasaran kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022 adalah **“Tersedianya Produk Perikanan dan Peternakan lokal Bogor”**, dengan Indikator sasaran sebagai berikut:

##### 1. Jumlah Produksi Perikanan

###### **Strategi:**

1. Meningkatkan produksi perikanan
2. Meningkatkan pengawasan usaha perikanan tangkap dan budidaya di Perairan Umum
3. Meningkatkan Produksi Olahan perikanan

###### **Arah Kebijakan:**

1. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
2. Pengawasan perikanan tangkap dan budidaya di Perairan Umum
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

##### 2. Jumlah Produksi Peternakan

###### **Strategi:**

1. Meningkatkan sarana prasarana Peternakan

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pelaku usaha pertanian (peternakan)
3. Meningkatkan SDM dan Kelembagaan pertanian (peternakan)
4. Meningkatkan pelayanan dan penanganan penyakit ternak dan zoonosis
5. Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian (peternakan)

**Arah Kebijakan:**

1. Fasilitasi bahan/alat, infrastruktur pertanian (peternakan)
2. Peningkatan pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian (peternakan)
3. Peningkatan jumlah kelompok petani (peternak)
4. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
5. Pengendalian dan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis

Dari tujuan dan sasaran kinerja dinas diatas, maka Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	104,5
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	128.247
3	Jumlah Produksi Benih Ikan	RE	5.827.940
4	Jumlah Produksi Ikan Hias	RE	300.864
5	Jumlah Petani Milenial (Pembudidaya Ikan)	Orang	55
6	Persentase Perairan Umum yang di monitoring	%	17

7	Persentase konservasi penangkapan dan budidaya ikan yang berkelanjutan	%	17
8	Jumlah Produksi Olahan perikanan	Ton	16.850
9	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg./Kap/Thn	30,67
10	Jumlah Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)	Ton	563.712
11	Jumlah Infrastruktur yang baik	Unit	12
12	Jumlah Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (peternakan)	Unit usaha	76
13	Jumlah Kelompok peternak	Kelompok	24
14	Jumlah Petani Milenial (Peternak)	Orang	30
15	Persentase Pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis	%	70
16	Jumlah Penyakit yang dikendalikan	Jenis	3

Prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renja ini dilaksanakan secara gterpadu berdasarkan urusan/kewenangan dengan pendanaan bersifat indikatif. Prioritas Program, kegiatan dan sub kegiatan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2022. Pada APBD Tahun 2022 Dinas Perikanan dan Peternakan akan melaksanakan 11 (sebelas) Program, ?? Kegiatan dan ????? Sub Kegiatan.dengan jumlah anggaran sebesar Rp. XX. Xxxxxx. Secar Runci Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Pendanaan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
	<b>URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>	
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan	

	Tangkap	
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	
	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
	Sub Kegiatan: Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
	<b>Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
<b>3</b>	<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	

	dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
<b>4</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	
	<b>Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
	<b>Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>UPT SARANA USAHA PERIKANAN</b>	
	<b>URUSAN PERTANIAN</b>	
<b>5</b>	<b>Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</b>	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
	<b>Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam</b>	

	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
	<b>Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
<b>6</b>	<b>Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</b>	
	<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
	Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	
7	Program Perizinan usaha pertanian	
8	Program Penyuluhan pertanian	
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
10	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	



11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kabupaten Bogor dengan segala potensi sumberdaya perikanan dan peternakan yang cukup melimpah, memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat mengatasi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor sendiri sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap daerah disekitarnya. Keberadaan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, teknologi serta potensi pendukung lainnya harus dapat diformulasikan secara tepat guna sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan sector perikanan dan peternakan di Kabupaten Bogor secara optimal dan membantu proses percepatan pemulihan ekonomi daerah yang terdampak oleh adanya pandemic Covid-19 pada 2 (dua) tahun terakhir ini.

Keberhasilan pembangunan perikanan dan peternakan dalam meningkatkan produksi berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu semua unsur yang terlibat dalam kegiatan perikanan dan peternakan dituntut berperan optimal untuk menggali, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumberdaya yang ada. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lainnya yang ada di Jawa Barat, serta para *stakeholder* pendukung pembangunan perikanan dan peternakan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Besar kecilnya tingkat pencapaian keberhasilan pembangunan perikanan dan peternakan ditentukan oleh tingkat pengalokasian input yang terdiri dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana prasarana perikanan, serta kemampuan manajemen yang meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan teknologi dan unsur-unsur manajemen (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi). Kedua factor tersebut merupakan dua mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga perlu mendapatkan perhatian secara proporsional.

Keberhasilan pembangunan sector perikanan dan peternakan juga akan sangat dipengaruhi oleh adanya peran aktif masyarakat yang terdiri dari masyarakat nelayan kecil, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, peternak, pengolah hasil peternakan, pengusaha, koperasi/KUD, LSM dan perangkat daerah lainnya yang terkait dengan Dinas Perikanan dan Peternakan yang ada di Kabupaten Bogor.

Demikian rencana kerja ini disusun, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Bogor tahun 2022, sehingga hasilnya dapat lebih terarah tepat sasaran, sekaligus dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatannya.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD Tahun Lalu (2021)**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Bogor, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor untuk tahun 2021 memperoleh anggaran DPA yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor dan APBN (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

➤ Pendapatan	: Rp.	640.180.000,-
➤ Belanja Daerah	: Rp.	42.426.747.000,-
- APBD MURNI	: Rp.	41.448.747.000,-
- DAK KKP	: Rp.	978.000.000,-

Pada bulan Februari 2021, mengalami Refocusing menjadi:

➤ Belanja Daerah	: Rp.	39.005.018.363,-
- APBD MURNI	: Rp.	38.027.018.363,-
- DAK KKP	: Rp.	978.000.000,-

\*berkurang Rp. 3.421.728.637 dari pagu awal APBD

Pada bulan Oktober 2021, mengalami perubahan kembali menjadi:

➤ Belanja Daerah	: Rp.	39.268.390.531,-
- APBD MURNI	: Rp.	38.290.390.531,-
- DAK KKP	: Rp.	978.000.000,-

\*bertambah Rp. 263.372.168 dari pagu Parsial

Adapun realisasi keuangan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Pendapatan : Rp. 491.431.450,- (102,18%)
- Belanja Daerah : Rp. 49.175.103.442,- (97,35 %)
  - Belanja Tidak Langsung : Rp. 21.006.407.354,- (98,59%)
  - Belanja Langsung : Rp. 28.168.696.088,- (96,44 %)

Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tahun 2021 telah mendorong masyarakat dan swasta di Kabupaten Bogor, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2021, maka evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2021 dan capaian Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

### **Indikator Kinerja**

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Perikanan dan Peternakan memberikan kontribusi terhadap pencapaian salah satu dari lima Panca Karsa Kabupaten Bogor yaitu “**Bogor Maju**”, mewujudkan perekonomian daerah berdayasaing dan berkelanjutan. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebesar **100,73%**, dengan predikat

kinerja Sangat Tinggi, Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci adalah sebagai berikut :

- 1) Produksi Ikan dari rencana sebesar 123.963 ton, terealisasi sebesar 123.134 ton, atau 100,94%;
- 2) Produksi Ikan Hias dari rencana sebesar 287.721 RE, terealisasi sebesar 290.440,09 RE, atau 100,95%;
- 3) Produksi Benih Ikan dari rencana sebesar 5.628.676 RE, terealisasi sebesar 5.677.645,98 RE, atau 100,87%;
- 4) Konsumsi Ikan dari rencana sebesar 29,77 kg/kap/thn, terealisasi sebesar 29,77 kg/kap/thn, atau 100,00%;
- 5) Produksi Olahan Produk Perikanan dari rencana sebesar 22.718 Ton, terealisasi sebesar 22.728 Ton, atau 100,05%;
- 6) Produksi Daging dari rencana sebesar 187.645 Ton terealisasi sebesar 191.756 Ton, atau 102,19%.
- 7) Produksi telur dari rencana sebesar 47.520 Ton terealisasi sebesar 47.587 Ton, atau 100,14%.
- 8) Produksi Susu dari rencana sebesar 19.335 Ton terealisasi sebesar 19.466 Ton, atau 100,69%;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2021 menghasilkan rata-rata capaian **indikator kinerja output sebesar 100%**, termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi. **Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 28.084.587.088; atau 96,15% dari total rencana anggaran Rp. 29.208.069.000,-.** Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut.

**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**, dengan kegiatan yang mendukung urusan perikanan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

1.1.3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

**2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**, dengan kegiatan yang mendukung urusan perikanan sebanyak ..... kegiatan dan .... Sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi,

dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.

2.2 Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

2.2.1 Sub Kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

2.2.2 Sub Kegiatan pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2.3 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.3.1 Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

2.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4.3 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



**3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

3.1 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

3.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

**4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

4.1 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

4.1.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

4.2.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

4.3 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

4.3.1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.3.2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

5.1 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

5.2 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

5.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

5.3 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

5.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

5.4 Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

5.4.1 Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

**6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

6.1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

6.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

6.2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

6.2.1 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

**7. Program Penyuluhan Pertanian**

7.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

7.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

**8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

8.1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

8.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

8.2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

8.2.1. Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

8.2.2. Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

8.2.3. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

8.3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

8.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

8.4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

8.4.1. Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

8.4.2. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

8.4.3. Sub Kegiatan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

8.4.4. Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

**9. Program Perizinan Usaha Pertanian**

9.1. Kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

9.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

**10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

10.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

10.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

10.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

10.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

10.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

10.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

10.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

10.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

10.2.1 sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

10.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

10.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

10.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

10.2.5 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

10.2.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

10.2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 10.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 10.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 10.3.2 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - 10.3.3 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 10.3.4 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 10.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 10.4.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - 10.4.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 10.4.3 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 10.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 10.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 10.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 10.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 10.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 10.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 10.5.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 10.5.7 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 10.5.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 10.5.9 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 10.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 10.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

10.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

10.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

10.6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

10.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

10.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

10.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

10.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

10.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

10.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

10.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

10.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

10.8.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara lengkap Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Kabupaten Bogor dapat dilihat pada **Tabel 2.1.**

1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan kegiatan yang mendukung urusan perikanan sebanyak 13 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

- 1.1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, dari rencana anggaran sebesar Rp. 405.989.000,- realisasinya sebesar Rp. 394.407.882,- atau 97,15%, dengan output dari rencana jumlah jenis vaksin sebanyak 5 jenis dan alat kedokteran sebanyak 5 jenis terealisasi sebesar 100%.
- 1.2 Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 594.959.000,- realisasinya sebesar Rp. 562.740.613 atau 94,58%, dengan output tersedianya PAH/HPAH yang ASUH di 40 kecamatan,realisasi sebesar 100 %.

- 1.3 Sosialisasi Keamanan Pangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 210.456.000,- realisasinya sebesar Rp. 204.347.974,- atau sekitar 97,10%, dengan output Bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap keamanan pangan asal ternak di 11 Kecamatan, terealisasi sebesar 100%.
- 1.4 Pelayanan Kesehatan Hewan, dari rencana anggaran sebesar Rp. Rp. 210.489.000,- realisasinya sebesar Rp. 203.936.454,- atau sekitar 96,89 % dengan output dari rencana jumlah obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan sebanyak 20 jenis, alat kedokteran hewan sebanyak 5 jenis terealisasi sebesar 100 %.
- 1.5 Pendukung Kegiatan UPT RPH, di Cibinong, Cibungbulang, Jonggol, Babakan Madang, Ciseeng, dari rencana anggaran sebesar 760.948.000,- realisasinya sebesar Rp. 725.874.100,- atau sekitar 95,39 %, dengan output dari rencana tersedianya sarana pendukung kegiatan di UPT sebanyak 1 paket, terealisasi sebesar 100 %.
- 1.6 Investigasi dan respon cepat penanggulangan penyakit Hewan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 160.519.000,- realisasinya sebesar Rp. 153.415.600,- atau sekitar 95,57%, dengan output Penanggulangan penyakit hewan di 40 kecamatan terealisasi sebesar 100%.
- 1.7 Pengawasan dan pembinaan layanan kesehatan dan obat hewan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 295.706.000,- realisasinya sebesar Rp. 271.255.220,- atau sekitar 91,73%, dengan output Pelayanan pembinaan obat Hewan di 40 kecamatan terealisasi sebesar 100%.
- 1.8 Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah I, dari rencana anggaran sebesar Rp. 415.821.000,- realisasinya



sebesar Rp. 404.944.500,- atau sekitar 97,38%, dengan output penyelenggaraan operasional kegiatan UPT selama 1 tahun terealisasi sebesar 100%.

1.9 Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah II, dari rencana anggaran sebesar Rp.249.381.000,- realisasinya sebesar Rp.238.288.335,- atau sekitar 95,55%, dengan output penyelenggaraan operasional kegiatan UPT selama 1 tahun terealisasi sebesar 100%.

1.10 Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah III, dari rencana anggaran sebesar Rp. 330.478.000,- realisasinya sebesar Rp. 318.228.600,- atau sekitar 96,29%, dengan output penyelenggaraan operasional kegiatan UPT selama 1 tahun terealisasi sebesar 100%.

1.11 Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah IV, dari rencana anggaran sebesar Rp. 255.213.000,- realisasinya sebesar Rp. 248.383.100,- atau sekitar 97,32%, dengan output penyelenggaraan operasional kegiatan UPT selama 1 tahun terealisasi sebesar 100%.

1.12 Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah V, dari rencana anggaran sebesar Rp. 252.374.000,- realisasinya sebesar Rp. 247.845.000,- atau sekitar 98,21%, dengan output penyelenggaraan operasional kegiatan UPT selama 1 tahun terealisasi sebesar 100%.

1.13 Penyelenggaraan Kegiatan UPT Puskesmas Wilayah VI, dari rencana anggaran sebesar Rp. 255.301.000,- realisasinya sebesar Rp. 244.367.000,- atau sekitar 95,72%, dengan output penyelenggaraan operasional kegiatan UPT selama 1 tahun terealisasi sebesar 100%.

- 2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, yang terdiri dari 8 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :
- 2.1. Pengelolaan Data Peternakan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 129.221.000,- realisasinya sebesar Rp. 116.961.000,- atau 90,51%, dengan output Pengumpulan Data Bidang Peternakan selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100 %.
  - 2.2. Pengembangan Budidaya Peternakan Keluarga Sangat Miskin di Lokasi PKH, dari rencana anggaran sebesar Rp. 676.309.000,- realisasinya sebesar Rp. 674.483.500,- atau 99,73%, dengan output Penyebaran bantuan Ternak domba untuk RTSM sebanyak 200 ekor, terealisasi sebesar 100%. Bantuan ini didistribusikan untuk RTSM di Kecamatan Rancabungur, Cariu, Parungpanjang, Parung, Ciawi, Tajurhalang, Megamendung, Cisarua, Tamansari dan Leuwiliang.
  - 2.3. Pengembangan Ternak Kecil, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.527.793.000,- realisasinya sebesar Rp. 2.373.146.440,- atau sekitar 93,88 %, dengan output dari rencana jumlah bantuan ternak kecil sebanyak 1.242 Ekor, terealisasi sebesar 100%. Bantuan ini didistribusikan untuk 46 Kelompok tani ternak di kecamatan Tajurhalang, Ciseeng, Parung, Kemang, Megamendung, Citereup, Cisarua, Ciawi, Jonggol, Gunungputri, Cariu, Cileungsi, Cariu, Sukamakmur, Dramaga, Cigombong, Tamansari, Cijeruk, Cibungbulang, Leuwiliang, Leuwisadeng, Rancabungur, Nanggung, Cigudeg, Sukajaya, dan Jasinga.
  - 2.4. Pengembangan Ternak Besar, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.435.334.000,- realisasinya sebesar Rp.

2.366.521.137,- atau 97,17%, dengan output dari rencana jumlah bantuan Ternak Besar sebanyak 80 ekor, terealisasi 100%. Bantuan ini didistribusikan untuk 8 kelompok di kecamatan Jasinga, Ciawi, Tajurhalang, Cisarua, Jonggol, Pamijahan dan Tanjungsari.

- 2.5. Pengembangan Ternak Unggas dari rencana anggaran sebesar Rp. 295.188.000,- realisasinya sebesar Rp. 285.183.600,- atau 96,61 %, dengan output Bantuan ternak unggas dan sarana Produksi di 12 Kecamatan, terealisasi sebesar 100%. Bantuan ini didistribusikan untuk 4 kelompok di kecamatan TajurHalang, Sukamakmur, Cibinong dan Megamendung.
- 2.6. Pengawasan Mutu Pakan dan Mutu Bibit Ternak, dari rencana anggaran sebesar Rp. 133.382.000,- realisasinya sebesar Rp. 119.315.675,- atau 89,45%, dengan output Pengawasan Mutu Pakan dan Bibit Ternak di Kabupaten Bogor, terealisasi 100%.
- 2.7. Penyelenggaraan Kegiatan UPT Pembibitan Ternak, dari rencana anggaran sebesar Rp. 934.206.000,- realisasinya sebesar Rp. 917.857.100,- atau 98,25%, Penyelenggaraan operasional UPT pembibitan Ternak selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%
- 2.8. Penyelenggaraan Kegiatan Taman Teknologi Pertanian (TTP) bidang peternakan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 625.450.000,- realisasinya sebesar Rp. 557.145.890,- atau 89,08 %, dengan output Penyelenggaraan Taman Teknologi Pertanian selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.

- 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, yang terdiri dari 6 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :
- 3.1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 132.345.000,- realisasinya sebesar Rp. 129.447.723,- atau 97,81%, dengan output Promosi peternakan melalui bazar dan pameran selama 1 tahun terealisasi sebesar 100%.
  - 3.2. Penyusunan data Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 88.031.000,- realisasinya sebesar Rp. 83.577.906,- atau 94,94%, dengan output Data Informasi Pasar Hasil Peternakan selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
  - 3.3. Temu Usaha Peternakan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 145.000.000,- realisasinya sebesar Rp.125.166.570,- atau 86,32%, dengan output Temu Usaha untuk pelaku usaha peternakan sebanyak 3 komoditi, terealisasi sebesar 100%.
  - 3.4. Pengembangan Usaha Peternakan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 243.860.000,- realisasinya sebesar Rp. 237.159.500,- atau 97,25% dengan output terlaksananya Pembinaan pelaku usaha peternakan sebanyak 30 orang terealisasi sebesar 100%.
  - 3.5. Pemberdayaan usaha hasil peternakan Keluarga sangat miskin di lokasi PKH, dari rencana anggaran sebesar Rp. 205.825.000,- realisasinya sebesar Rp. 201.078.500,- atau 97,69% dengan output Peningkatan sumber pendapatan RTSM sektor pengolahan peternakan dengan pemberian bantuan sarana pemasaran untuk 20 KK RTSM terealisasi sebesar 100%.
  - 3.6. Pengawasan dan Pelayanan Usaha Peternakan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 77.284.000,- realisasinya sebesar Rp.68.391.000,- atau 88,49% dengan output Pengawasan usaha

peternakan selama 1 tahun dan terlaksananya Audiensi Pelaku Usaha Bidang Peternakan untuk 30 orang, terealisasi sebesar 100%.

4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan, yang terdiri dari 4 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

4.1 Pelayanan Kesehatan Ikan, dari rencana anggaran sebesar Rp.206.196.000,- realisasinya sebesar Rp. 204.607.190,- atau 99,23% dengan output Terjaminnya kesehatan ikan milik masyarakat di 40 kecamatan terealisasi 100%.

4.2 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Perairan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 102.905.000,- realisasinya sebesar Rp. 101.693.866,- atau 98,82%, dengan output terlaksananya pemeriksaan Laboratorium logam dan cemaran biologi perairan sebanyak 20 sampel, monitoring OKB di 15 kecamatan dan informasi hasil uji kualitas air budidaya Kelompok di 18 Kecamatan, terealisasi sebesar 100%.

4.3 Penyelenggaraan Pos Pelayanan Ikan Terpadu, dari rencana anggaran sebesar Rp. 202.744.000,- realisasinya sebesar Rp. 196.321.500,- atau 96,83%, dengan output terlaksananya pengobatan ikan di 14 kecamatan, vaksinasi ikan di 7 kecamatan, uji kualitas air di 4 kecamatan dan fasilitasi obat ikan sebanyak 6 jenis, terealisasi sebesar 100%.

4.4 Pengawasan Pangan asal Ikan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 114.268.000,- realisasinya sebesar Rp. 114.267.150,- atau 99,99%, dengan output terlaksananya Uji laboratorium residu obat ikan, zat adiktif obat ikan pada ikan segar sebanyak 50 sampel dan Sosialisasi keamanan pangan asal ikan untuk 60 orang, terealisasi sebesar 100%.

5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, yang terdiri dari 11 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

- 5.1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul, dari rencana anggaran sebesar Rp. 399.036.000,- realisasinya sebesar Rp. 387.495.450,- atau 97,11% dengan output jumlah bantuan Induk ikan sebanyak 5 jenis, terealisasi 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Ciomas, Tamansari, Caringin, Cijeruk, Pamijahan, Tenjolaya, Dramaga, Rancabungur, Kemang, Caringin, Sukaraja, Ciseeng, Bojonggede, Cijeruk dan Cibungbulang.
- 5.2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.320.074.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.290.462.100,- atau 97,76%, dengan output jumlah bantuan benih ikan berkualitas sebanyak 5 jenis, terealisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Dramaga, Pamijahan, Rancabungur, Sukaraja, Caringin, Leuwiliang, Kemang dan Tajurhalang.
- 5.3 Pengelolaan Data Perikanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 227.595.000,- realisasinya sebesar Rp. 224.137.020,- atau 98,48%, dengan output Terpenuhinya kebutuhan Data Bidang Perikanan selama satu tahun, terealisasi sebesar 100%
- 5.4 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) di Lokasi Program Keluarga Harapan (PKH), dari rencana anggaran sebesar Rp. 478.014.000,- realisasinya sebesar Rp. 475.525.700,- atau 99,48%, dengan output Penyebaran bantuan benih ikan untuk RTSM sebanyak 70 KK, terealisasi sebesar 100%. Bantuan tersebut didistribusikan untuk RTSM di Kecamatan Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Leuwisadeng, Pamijahan, Cibungbulang dan Caringin.

- 5.5** Pengelolaan Kegiatan Kelompok Kerja Kawasan Minapolitan dan Perbenihan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 245.486.000,- realisasinya sebesar Rp. 241.565.200,- atau 98,40%, dengan output Fasilitasi Kelompok Kerja Minapolitan dan Perbenihan di 2 Lokasi, terealisasi sebesar 100%.
- 5.6** Penyelenggaraan Kegiatan UPT Pembenihan Ikan Cijeruk, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.061.545.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.002.595.250,- atau 94,45%, dengan output Terpenuhinya kebutuhan operasional BBI Cijeruk dan Rancabungur selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 5.7** Penyelenggaraan Kegiatan UPT Pembenihan Ikan Tenjolaya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.029.545.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.003.495.300,- atau 97,47%, dengan output Terpenuhinya kebutuhan operasional BBI Cibitung dan Pamijahan selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 5.8** Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Minapolitan dan Perbenihan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 222.200.000,- realisasinya sebesar Rp. 221.099.000,- atau 99,50%, dengan output Peningkatan sarana Kawasan Minapolitan dan Perbenihan di 1 lokasi, terealisasi sebesar 100%.
- 5.9** Penyebaran Benih Ikan di Perairan Umum, dari rencana anggaran sebesar Rp. 103.964.000,- realisasinya sebesar Rp. 101.323.700,- atau 97,46%, dengan output Penyebaran benih ikan di 16 situ terealisasi sebesar 100%.
- 5.10** Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias, dari rencana anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 196.502.700,- atau 98,25%, dengan output Penyebaran bantuan Ikan Hias sebanyak 4 jenis, terealisasi sebesar 100%. Kegiatan

tersebut dilaksanakan di Kecamatan Kemang, Cibinong, Dramaga dan Parung.

**5.11** Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan / UPTD BBI (DAK), dari rencana anggaran sebesar Rp. 668.114.000,- realisasinya sebesar Rp.665.895.000,- atau 98,17%, dengan output Pengadaan Sarpras BBI sebanyak 4 Jenis, terealisasi sebesar 100%.

6) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, yang terdiri dari 7 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

6.1. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 545.437.000,- realisasinya sebesar Rp. 541.261.500,- atau 99,23%, dengan output terlaksananya promosi perikanan melalui bazar selama 1 tahun dan festival minapolitan sebanyak 1 kali, terealisasi sebesar 100%.

6.2 Temu Usaha Perikanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 118.930.000,- realisasinya sebesar Rp. 103.389.510,- atau 86,93% dengan output terlaksananya pertemuan dengan para pelaku usaha perikanan sebanyak 120 Orang, terealisasi sebesar 100%.

6.3 Pengembangan Usaha Perikanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.106.959.000,- realisasinya sebesar Rp. 2.050.399.468,- atau 97,32%, dengan output terlaksananya Pengembangan usaha perikanan melalui desiminasi olahan dan PMMT masing-masing sebanyak 60 Orang, terealisasi sebesar 100%.

6.4 Penyusunan data Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Perikanan Masyarakat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 97.810.000,- realisasinya sebesar Rp.96.461.050,- atau



98,62%, dengan output tersedianya data Permintaan pasar sektor perikanan selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.

- 6.5 Penyelenggaraan Kegiatan UPT Sarana Usaha Perikanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 570.047.000,- realisasinya sebesar Rp. 541.998.630,- atau 95,08%, dengan output terlaksananya penyelenggaraan operasional UPT Sarana Usaha Perikanan selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 6.6 Pemberdayaan usaha hasil perikanan Keluarga sangat miskin di lokasi PKH, dari rencana anggaran sebesar Rp. 220.036.000,- realisasinya sebesar Rp. 216.870.500,- atau 98,56%, dengan output peningkatan sumber pendapatan RTSM sektor olahan perikanan sebanyak 10 KK RTSM, terealisasi sebesar 100%. Bantuan tersebut didistribusikan untuk RTSM di Kecamatan Cibinong.
- 6.7 Pengawasan dan Pelayanan Usaha Perikanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 197.012.000,- realisasinya sebesar Rp. 195.854.600,- atau 99,41%, dengan output Pengawasan dan pelayanan usaha melalui FD Kusuka sebanyak 80 Orang, terealisasi sebesar 100%.

7) Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Perikanan, yang terdiri dari 4 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

- 7.1 Peningkatan kemampuan Lembaga pembudidaya ikan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 236.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 233.367.500,- atau 98,88%, dengan output terselenggaranya pertemuan melalui rakor dan mimbar saresehan sebanyak 4 jenis, terealisasi sebesar 100%.

- 7.2 Lomba Kelompok Perikanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 195.606.000,- realisasinya sebesar Rp. 190.661.000,- atau 97,47% dengan output terfasilitasinya Lomba kelompok sektor perikanan, terealisasi sebesar 100%.
- 7.3 Penyediaan Jasa Tenaga Pendamping Pembinaan Perikanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 314.839.000,- realisasinya sebesar Rp.312.338.000,- atau 99,21%, dengan output tersedianya Penyuluh perikanan Bantu sebanyak 10 Orang terealisasi sebesar 100%.
- 7.4 Pembinaan Peningkatan Produksi Perikanan dari rencana anggaran sebesar Rp. 305.907.000,- realisasinya sebesar Rp.305.590.500,- atau 99,90%, dengan output Pembinaan melalui Bimtek CBIB dan CPIB 160 orang, terealisasi sebesar 100%.
- 8) Program Penerapan Teknologi Perikanan, yang terdiri dari 1 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :
- 8.1 Penyelenggaraan Demplot dan Kursus Perikanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 318.458.000,- realisasinya sebesar Rp.316.194.050,- atau 99,29% dengan output dari rencana terfasilitasinya demplot perikanan sebanyak 2 jenis di 6 kecamatan, terealisasi sebesar 100%.
- 9) Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Peternakan, yang terdiri dari 2 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :
- 9.1 Peningkatan Kemampuan Lembaga Peternak, dari rencana anggaran sebesar Rp. 123.666.000,- realisasinya sebesar Rp.107.078.500,- atau 86,59%, dengan output dari rencana

Terfasilitasinya Pembinaan Kelompok di 40 Kecamatan, terealisasi sebesar 100 %.

9.2 Pebinaan Peningkatan Produksi Peternakan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 250.720.000,- realisasinya sebesar Rp.246.500.000,- atau 98,32%, dengan output dari rencana Terfasilitasinya bimtek sebanyak 2 kali, terealisasi sebesar 100 %.

10) Program Penerapan Teknologi Perikanan, yang terdiri dari 1 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

10.1 Penyelenggaraan Demplot dan Kursus Perikanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 105.515.000,- realisasinya sebesar Rp. 86.388.000,- atau 81,87% dengan output dengan output dari rencana terfasilitasinya demplot peternakan di 3 kecamatan, terealisasi sebesar 100%.

11) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari 15 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

11.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 698.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 643.423.034,- atau 92,11 %, dengan output tersedianya sarana komunikasi: telepon, air dan listrik selama 12 bulan, terealisasi sebesar 100%.

11.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp. 40.750.000,- realisasinya sebesar Rp. 36.797.000,- atau 90,30%, dengan output tersedianya Surat Perizinan kendaraan dinas/operasional sebanyak 148 unit, terealisasi sebesar 100%.

11.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 224.311.000,- realisasinya sebesar Rp.

213.087.000,- atau 95,00%, dengan output terwujudnya Kebersihan Gedung Kantor sebanyak 2 gedung, terealisasi sebesar 100%.

- 11.4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 55.065.000,- realisasinya sebesar Rp.55.024.250,- atau 99,93%, dengan output tersedianya Jasa Tenaga Kerja Kontrak Pemda S1 1 orang, terealisasi sebesar 100%.
- 11.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 54.710.000,- realisasinya sebesar Rp. 54.694.250,- atau 90,14%, dengan output terpenuhinya kebutuhan ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI Diskanak selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 11.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 68.255.000,- realisasinya sebesar Rp. 67.971.000,- atau 99,58%, dengan output terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk pelaksanaan TUPOKSI Diskanak selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 11.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.27.657.000,- realisasinya sebesar Rp.27.657.000,- atau 100,00%, dengan output tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 11.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.35.175.000,- realisasinya sebesar Rp.35.160.000,- atau 99,96%, dengan output terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.

- 11.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.35.175.000,- realisasinya sebesar Rp.34.826.000,- atau 99,01%, dengan output terpenuhinya kebutuhan logistik Dinas selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 11.10 Penyediaan Makanan dan Minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp.100.800.000,- realisasinya sebesar Rp. 98.865.000,- atau sekitar 98,08%, dengan output terpenuhinya jamuan makan minum tamu dan rapat dinas selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 11.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.525.000.000,- realisasinya sebesar Rp.524.127.680,- atau sekitar 99,83%, dengan output terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah kebutuhan selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 11.12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.5.292.000,- realisasinya sebesar Rp.5.127.680,- atau 97,22%, dengan output tertatanya arsip disnakan selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 11.13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dari rencana anggaran sebesar Rp.299.800.000,- realisasinya sebesar Rp.216.862.500,- atau 94,37%, dengan output tertatanya administrasi kepegawaian selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 11.14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang, dari rencana anggaran sebesar Rp.4.725.000,- realisasinya sebesar Rp.4.316.500,- atau 91,35%, dengan output tertatanya administrasi barang selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.

11.15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.156.565.000,- realisasinya sebesar Rp. 148.320.000,- atau 95,34 %, dengan output tersedianya jasa piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 tahun sebanyak 6 orang petugas piket, terealisasi sebesar 100%.

12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari 7 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

- 12.1 Pengadaan Peralatan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 125.150.000,- realisasinya sebesar Rp. 123.083.000,- atau sekitar 98,35%, dengan output tersedianya peralatan kantor, terealisasi sebesar 100%.
- 12.2 Pengadaan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.171.375.000,- realisasinya sebesar Rp.160.670.000,- atau sekitar 93,75%, dengan output tersedianya peralatan kantor, terealisasi sebesar 100%.
- 12.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.106.548.000,- realisasinya sebesar Rp.105.237.000,- atau sekitar 98,77%, dengan output terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 unit, terealisasi sebesar 100%.
- 12.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 265.000.000,- realisasinya sebesar Rp.260.561.500,- atau sekitar 98,33%, dengan output terpeliharanya taman dan halaman kantor, terealisasi sebesar 100%.
- 12.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp. 312.921.000,- realisasinya sebesar Rp.300.179.071,- atau sekitar 95,93%, dengan output

terpeliharanya kendaraan dinas operasional sebanyak 121 Unit, terealisasi sebesar 100%.

12.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor, dari rencana Rp. 82.197.000,- realisasinya sebesar Rp. 81.622.000,- atau sekitar 99,30%, dengan output terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 2 jenis, terealisasi sebesar 100%.

12.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.52.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 50.404.000,- atau sekitar 96,01%, dengan output terpeliharanya peralatan kantor sebanyak 4 jenis, terealisasi sebesar 100%.

13)Program Peningkatan Disiplin Aparatur; yang terdiri dari 1 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

13.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dari rencana anggaran sebesar Rp.101.800.000,- realisasinya sebesar Rp. 100.895.500,-, atau 100%, dengan output tersedianya pakaian dinas untuk pegawai 1 SKPD, terealisasi sebesar 100%.

14)Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; yang terdiri dari 1 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

14.1 Pembinaan Mental dan Rohani Aparatur, dari rencana anggaran sebesar Rp.30.672.000,- realisasinya sebesar Rp. 30.600.000,-, atau 99,77%, dengan output terlaksananya bimbingan jasmani dan rohani pegawai 1 SKPD, terealisasi sebesar 100%.

15)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang terdiri dari 9 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

- 15.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.605.000 realisasinya sebesar Rp.5.207.000 atau 92,90%, dengan output tersusunnya laporan kinerja SKPD selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 15.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.250.000,- realisasinya sebesar Rp.9.437.500,- atau 92,07%, dengan output tersusunnya laporan keuangan semesteran, terealisasi sebesar 100%.
- 15.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dari rencana anggaran sebesar Rp.12.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 11.867.500,- atau 94,94%, dengan output tersusunnya laporan keuangan akhir tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 15.4 Penyusunan Perencanaan Anggaran, dari rencana anggaran sebesar Rp.13.120.000,- realisasinya sebesar Rp. 12.562.000,- atau 95,75%, dengan output tersusunnya perencanaan anggaran sebanyak 2 jenis, terealisasi sebesar 100%.
- 15.5 Penatausahaan Keuangan SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.8.500.000,- realisasinya sebesar Rp.8.229.000,- atau sekitar 96,82%, dengan output dari tersusunnya laporan penatausahaan keuangan selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.
- 15.6 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp 87.925.000,- realisasinya sebesar Rp. 84.791.200,- atau sekitar 96,44%, dengan output terlaksananya monitoring dan evaluasi untuk 86 kegiatan, terealisasi sebesar 100%.
- 15.7 Publikasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.150.000.000- realisasinya sebesar Rp.147.500.000,- atau



100,00 %, dengan output terpublikasinya kinerja Diskanak Tahun 2019 pada media lokal selama 1 tahun, terealisasi sebesar 100%.

15.8 Penyusunan Renja SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.39.410.000- realisasinya sebesar Rp.39.106.500,- atau 99,23%, dengan output tersusunnya rencana kerja dinas tahun 2019, terealisasi sebesar 100%.

15.9 Penyusunan Restra SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.36.300.000- realisasinya sebesar Rp.35.657.500,- atau 98,23%, dengan output tersusunnya rencana strategis dinas tahun 2018-2023, terealisasi sebesar 100%.

Secara lengkap Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.1.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sasaran prioritas nasional bidang ketahanan pangan lingkup perikanan dan peternakan diantaranya:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri melalui produksi daging.
2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengembangan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistem Logistik Nasional dan penerapan sistem rantai dingin di 100 sentra perikanan.
3. Terwujudnya perbaikan sistem manajemen Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menjaga keberlanjutan kelimpahan stok sumberdaya ikan.

Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan terkait dengan perikanan dan peternakan adalah sebagai berikut:

- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi, melalui: (i) peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap sesuai potensi dan keunggulan lokal dan tata ruang wilayah; (ii) pengembangan budidaya (marikultur) dilokasi-lokasi potensial; (iii) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (iv) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha perikanan; (v) melanjutkan revitalisasi tambak-tambak dan

kolam yang tidak produktif; (vi) pengembangan keterpaduan usaha hulu dan hilir, termasuk penguatan sentra-sentra pengolahan produk perikanan berbasis keunggulan lokal yang diintegrasikan dengan model pengembangan *techno park* dan *science park*; (vii) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan.

- 2) Penguatan Faktor Input dan Sarana Prasarana Pendukung Produksi, dengan: (i) menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input, yang mencakup BBM, benih ikan berkualitas (unggul), pakan murah, obat-obatan, dan pakan berbasis bahan baku lokal (ii) penguatan sistem dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan induk unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting; (iii) pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur pelabuhan perikanan dan sarana penangkapan ikan dan pengembangan *eco fishing port* di lokasi-lokasi terpilih dan strategis termasuk restrukturisasi dan modernisasi armada perikanan untuk peningkatan operasional kapal-kapal skala menengah dan besar (30 GT keatas); (iv) melengkapi pasokan air bersih dan energi (listrik) di pelabuhan perikanan; (v) pengembangan infrastruktur irigasi ke tambak dan kolam dengan kerjasama lintas pelaku dan pemerintah daerah; (vi) Pengembangan Kebun bibit rumput laut di wilayah yang potensial
- 3) Penguatan keamanan produk pangan perikanan, melalui: (i) peningkatan efektivitas karantina perikanan untuk pengendalian penyakit, jaminan mutu produksi dan keamanan pangan melalui sistem karantina yang terintegrasi (*Integrated Quarantine and Safety Control Mechanism*) dan pencegahan/penanggulangan penyakit ikan (*Biosecurity*); (ii) penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (*Good Aquaculture Practices*) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (*Good*

*Handling Practices*) pada pembudidaya ikan tersertifikasi; dan (iii) pengembangan produk perikanan berkualitas dan memenuhi standar *Hazard Analysis and Critical Control/HACCP* untuk menjamin keamanan produk dan mutu pangan olahan.

- 4) Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan, melalui: (i) pembentukan sistem dan kelembagaan penjamin pelaku dan usaha perikanan; (ii) dukungan penyediaan sumber pembiayaan yang murah, mudah, dan aksesibel untuk pengembangan perikanan; (iii) pengembangan fasilitasi kredit dan pengembangan asuransi nelayan; (iv) pemberian pelatihan kemampuan teknis untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (v) pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan, antara lain melalui gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil laut; (vi) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan (vii) penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan/petambak garam/pembudidaya/ pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.
- 5) Peningkatan produksi daging sapi dan non sapi dalam negeri melalui: (i) penambahan populasi bibit induk sapi, (ii) pengembangan kawasan peternakan dengan mendorong investasi swasta dan BUMN dan peternakan rakyat non sapi; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penambahan bibit induk sapi, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan nasional untuk pengendalian penyakit, khususnya zoonosis;

- 6) Pengembangan kawasan sentra produksi komoditas unggulan yang diintegrasikan dengan model pengembangan *techno park* dan *science park*, dan pasar tradisional serta terhubung dengan tol laut;
- 7) Penguatan sistem keamanan pangan melalui perkarantinaan dan pengendalian zoonosis.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor mendukung 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu: Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian. Dalam pelaksanaan Program dan Keegiatannya, Dinas Perikanan dan Peternakan tidak terlepas dari Visi dan Misi kedua lembaga tersebut.

#### **A. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Visi Kementerian Kelautan RI tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terutama melaksanakan empat misi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Menjabarkan mision pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, Yakni:
  - a. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP Meningkatkan;

- b. Inovasi dan Riset KP menguat;
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni:
  - a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal;
  - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat;
  - c. Pengawasan pengelolaan SDKP;
  - d. Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat;
  - e. Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumberdaya KP, yakni:  
Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP, yakni:  
Kinerja reformasi birokrasi KKP meningkat

## **B. URUSAN PERTANIAN**

Visi Kementerian Pertanian adalah **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi Kementerian Pertanian, adalah:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan Nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

## 4.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Sebagai bentuk tindak lanjut rencana pembangunan nasional maka Provinsi Jawa Barat pun menyusun arah pembangunannya sejalan dengan yang digariskan pemerintah pusat. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”** dan dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu:

- Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
- Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
- Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023
- Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
- Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terdapat 5 (lima) isu strategis dalam pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, Pengangguran, dan masalah social;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; serta
5. Reformasi Birokrasi.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Jawa Barat 2018-2023 menjadi 9 prioritas, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua;
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan;
3. Pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi;
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
6. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah pengelolaan lingkungan hidup;
7. Gerakan membangun desa (Gerbang Desa);
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (Golekmah); dan
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Kebijakan operasional pembangunan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018-2023 adalah:

1. Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah;
2. Menuntaskan program-program yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan;
3. Memberi dukungan, pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha;
4. Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan pembangunannya karena mengalami hambatan;
5. Melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama bupati dan walikota dengan dukungan dari pemerintah pusat.



Pembangunan perikanan dan peternakan termasuk dalam isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa upaya yang akan dilakukan diantaranya: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan, dan (2) Ketahanan Pangan. Pembangunan perikanan dan peternakan termasuk dalam target *Common Goals* Tematik Sektoral; Meningkatkan Ekonomi Pertanian dengan sasaran:

1. Jawa Barat sebagai sentra produksi benih/bibit nasional;
2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry;
3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani;
4. Jawa Barat bebas rawan pangan;
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan.

Sedangkan dalam Pembangunan Tematik Sektoral, Kabupaten Bogor yang tergabung dalam zona pengembangan wilayah I diarahkan untuk (1) Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal, dan (2) Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global.

Secara ringkas identifikasi kebijakan nasional dan propinsi terkait dengan pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dalam Tabel 3.1

#### **4.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor secara fungsional memiliki fungsi dan peranan

sebagai lembaga yang tidak hanya menjabarkan kebijakan daerah, akan tetapi harus menjabarkan pula kebijakan pembangunan yang telah digariskan secara nasional. Tujuan penyusunan Renja adalah menuangkan rencana kerja dinas dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Dalam kaitan tersebut, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor telah menetapkan sasaran kinerja untuk tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kesekretariatan

- a. Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan 100%
- b. Presentasi Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai 100%
- c. Persentase Perencanaan sesuai Target 100%
- d. Persentasi Kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target 100%
- e. Persentase pelayanan Kesekretariatan 100%

2. Bidang Produksi Perikanan

- a. Tercapainya produksi perikanan :

Produksi perikanan tangkap	:	104,5	Ton
Produksi perikanan budidaya	:	128.247	Ton
Produksi Benih Ikan	:	5.827.940	RE
Produksi Ikan Hias	:	300.864	RE

- b. Persentase Perairan Umum

yang di monitoring : 17 %

- c. Persentase konservasi penangkapan

dan budidaya ikan yang berkelanjutan : 17 %

- d. Petani Milenial (Pembudidaya ikan)

: 55 Orang

3. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

- a. Produksi olahan produk perikanan : 16.850 Ton

- b. Konsumsi Ikan : 30,67 kg/kap/th

## 4. Bidang Peternakan

## a. Tercapainya produksi asal ternak :

Produksi Daging	:	208,533	Ton
Produksi Telur	:	147.937	Ton
Produksi Susu	:	24.475	Ton
Produksi Olahan Ternak	:	182.767	Ton

b. Jumlah Infrastruktur peternakan yang baik : 12 Unit

c. Jumlah kelompok peternak : 24 Kelompok

d. Jumlah Petani Milenial (Peternak) : 30 Orang

## 5. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

## a. Persentase pengendalian penyakit hewan

Menular dan Zoonosis : 70 %

b. Jumlah penyakit yang dikendalikan : 3 Jenis